



Polemik Kampung Bayam Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok Tani Kampung Bayam Madani memprotes penangkapan Muhammad Furqon terkait polemik Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara. PT Jakarta Propertindo (Perseroda), selaku pengelola kampung yang disebut Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium, menyerahkan proses hukum ke Polres Metro Jakarta Utara.

Polisi menangkap Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Furqon, Selasa (2/4/2024). Istri Furqon, Munjiah, menyaksikan penangkapan suaminya. Munjiah sempat dibawa ke kantor polisi dan dipulangkan pada pukul 22.00.

Penangkapan ini tak lepas dari polemik antara warga Kampung Bayam dan Jakarta Propertindo. Puncaknya, Jakarta Propertindo melaporkan empat warga, termasuk Furqon, ke Polres Metro Jakarta Utara karena dianggap telah menerobos masuk ke kawasan pekarangan rumah susun. "Polisi masuk ke dalam rumah dan menangkap Furqon. Saya juga dibawa," kata Munjiah, Rabu (3/4).

Munjiah menanyakan alasan penangkapan tersebut dan polisi menjawab jika nanti akan dijelaskan di kantor polisi. Dia menyayangkan penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan Furqon diperlakukan bak seorang teroris.

"Sampai saat ini belum pernah ada mediasi dan belum ada solusi yang tepat serta tidak ada mediasi yang obyektif dan netral yang berpihak kepada warga," kata Munjiah.

Pendamping warga Kampung Bayam, Yusron, menambahkan, Furqon dilaporkan bersama Sudir, Somat, dan Junaidi. Mereka kemudian dimintai keterangan oleh polisi sebagai bentuk klarifikasi laporan Ja-

karta Propertindo.

"Yang terjadi, laporan naik tingkat ke penyidikan hingga status saksi menjadi tersangka dan yang menjadi tersangka halnya Furqon," kata Yusron.

Menurut dia, Furqon menolak surat pemanggilan karena penyelidikan tidak disertai bukti yang cukup. Akhirnya, Furqon dijemput paksa Selasa malam. "Kami memandang tindakan kepolisian ini sudah melampaui batas prosedur maupun sisi kemanusiaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Yusron.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Ajun Komisaris Besar Hady Saputra Siagian belum merespons permintaan konfirmasi penangkapan Furqon hingga berita ini ditulis, Rabu (3/4) malam.

Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi menyebut, laporan atau kasus tersebut masih didalami dan pihaknya akan berkomunikasi dengan Polres Metro Jakarta Utara. "Masih didalami dan akan dikomunikasikan dengan Polres Metro Jakarta Utara," ujar Ade.

Ikuti proses hukum

Jakarta Propertindo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polres Metro Jakarta Utara. Manajemen meminta semua pihak untuk kooperatif serta menjaga suasana yang aman dan kondusif serta tidak terpancing oleh isu-isu liar.

Direktur Utama Jakarta Propertindo Iwan Takwin mengatakan, manajemen menyayangkan tindakan di luar batas yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Hunian Pekerja Pendukung Operasional Jakarta International Stadium. Atas dasar

itu, manajemen melaporkan adanya tindakan penyerobotan lahan secara ilegal, perusakan aset, dan pencurian yang dilakukan oleh warga ke Polres Metro Jakarta Utara pada 7 Desember 2023.

Warga dilaporkan karena memasuki pekarangan tanpa seizin manajemen pada 29 November 2023 dan awal Desember 2023. Upaya pencegahan dan peringatan tidak digubris dan warga mengganti lubang kunci agar bisa masuk ke dalam unit. Warga juga memanfaatkan akses air bersih secara ilegal yang berdampak pada beban biaya operasional.

"Hingga kini warga belum memiliki hak atas tanah maupun bangunan. Kami bersama seluruh pemangku terus mitigasi serta memetakan opsi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat," kata Iwan.

Rumah susun

Atas polemik yang terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bagi warga Kampung Bayam. Pembangunan ditargetkan mulai Januari 2025 dan tuntas akhir 2025.

Penjabat Gubernur DKI He-ru Budi Hartono, Rabu (24/1), menyampaikan rencana pembangunan rumah susun baru di Kecamatan Tanjung Priok dengan jumlah 150-200 unit hunian. Rumah susun tersebut ditujukan bagi warga terprogram dan warga Kampung Bayam.

Rencana tersebut digodok matang bersama Asisten Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebulan terakhir. Pembangunan rusun baru dinilai sebagai solusi terbaik yang bisa diberikan pemerintah untuk menyelesaikan polemik Kampung Bayam. Namun, pemerintah belum menyosialisasi-

sikan pembangunan rusun baru kepada warga.

Sebelumnya, warga Kampung Bayam menolak rencana pemerintah memindahkan mereka ke rumah susun baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga tetap ingin menghuni Kampung Susun Bayam (*Kompas*, 29/1/2024).

Warga menilai pihaknya sudah terdaftar dalam verifikasi penghuni oleh Jakarta Propertindo dan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta berdasarkan Surat Wali Kota Jakarta Utara Nomor e-0176/PU.04.00 yang dikeluarkan pada Juni 2022.

Terkait polemik dan rencana pemindahan ini, warga yang tergabung dalam Persatuan Warga Kampung Bayam dengan dukungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Jaringan Rakyat Miskin Kota meminta tiga hal kepada PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, warga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan kunci unit Kampung Susun Bayam kepada warga yang terverifikasi berdasarkan Surat Wali Kota Jakarta Utara dan memproses penempatan warga sesuai program penataan kampung dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 979 Tahun 2022 tentang Lokasi Penataan Kampung dan Masyarakat Tahap II

Kedua, warga meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana pemindahan warga Kampung Bayam ke tempat lain sebagai tempat tinggal tetap, seperti Rumah Susun (Rusun) Nagrak. Ketiga, warga meminta penghentian upaya hukum terhadap warga Kampung Bayam yang sedang menuntut haknya karena warga dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusia untuk dapat tinggal di Kampung Susun Bayam. (DAN)